

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL DALAM PRESPEKTIF UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 ( Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006)**

Oleh  
**Muhammad Alfariji Nasution**

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ialah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk: Menguji undang-undang terhadap UUD Negara republik Indonesia tahun 1945, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara republik Indonesia Tahun tahun 1945, memutuskan pembubaran partai politik, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Implikasi Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 adalah Pelemahan Komisi Yudisial Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang berakibat pada Pencabutan kewenangan Komisi Yudisial untuk melakukan pengawasan eksternal terhadap Mahkamah Konstitusi dan berakibat pada hilangnya kekuatan mengikat aturan-aturan pengawasan Komisi Yudisial serta hilangnya sebagian besar kewenangan Komisi Yudisial untuk menjatuhkan sanksi.

Formulasi Pengawasan Hakim Konstitusi dan Hakim Agung setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 ialah dengan membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Majelis Kehormatan merupakan perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluruhan martabat, dan Kode Etik Hakim Konstitusi terkait dengan laporan mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang disampaikan oleh dewan etik.

Kata Kunci : Pengawasan Hakim

## **ABSTRACT**

# **JURIDIC ANALYSIS REGARDING SUPERVISION OF JUDGES BY THE JUDICIAL COMMISSION IN PERSPECTIVE OF THE BASIC STATE LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA YEAR 1945**

**(Study of Constitutional Court Decision Number 005/PUU-IV/2006)**

By

Muhammad Alfariji Nasution

The authority of the Constitutional Court In the laws and regulations in Indonesia, it is authorized to adjudicate at the first and final level to: examine laws against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, decide on disputes over the authority of state institutions whose authority is granted by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, decide dissolution of political parties, decide disputes about the results of general elections.

The Legal Implication of the Decision of the Constitutional Court Number 005/PUU-IV/2006 is the weakening of the Judicial Commission through the Constitutional Court's Decision which results in the revocation of the authority of the Judicial Commission to carry out external supervision of the Constitutional Court and results in the loss of binding power for the supervision rules of the Judicial Commission and the loss of most of the authority of the Judicial Commission to impose sanctions.

The formulation of Supervision of Constitutional Justices and Judges Angung after the Constitutional Court Decision Number 005/PUU-IV/2006 is to establish an Honorary Council of the Constitutional Court, hereinafter referred to as the Honorary Council, is a device established by the Constitutional Court to safeguard and upholding the honor, dignity, and Code of Ethics of Constitutional Justices in relation to reports of alleged serious violations committed by the Reported Judge or the Suspected Judge submitted by the ethics council.

Keywords: Judge Supervision.